

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin, Y. Z. (2016). *Komunikasi Pemerintahan Filosofi, Konsep dan Aplikasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Bungin, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Darumurti, Awang. (2013). *Diktat Metode Penelitian Sosial*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Dilla, S. (2012). *Komunikasi Pembangunan*. Bandung: Simbioasa Rekatama Media.
- Effendy, O. U. (2011). *Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hasan, E. (2005). *Paradigma Komunikasi Pemerintahan*. Bandung: PT. Refika Adhitama.
- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Pamudji, S. (1989). *Kepemimpinan Pemerintah di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Simatupang, P. (2017). Analisis Kebijakan: Konsep dasar dan Prosedur pelaksanaan. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 1(1), 1-23.
- Situmorang, M. & Sitanggang, C. (1995). *Hukum Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudrajat, A. S., & Ridwan, J. (2012). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Penerbit Nuansa.

Jurnal

Afandi, M., & Warijo. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 92-113.

Agoes, E. R. (2000). Hukum Sumberdaya Alam : Perlukan Suatu Pengaturan Tersendiri (Suatu Kajian Komparatif). *Hukum Sumberdaya Alam*, 2(2), 30-36.

Chayatain, U. & Saudah. (2016, Desember). MODEL KOMUNIKASI PEMERINTAH UNTUK KEBIJAKAN AKSELERASI PENINGKATAN STATUS PASAR TRADISIONAL - MODERN. *Dinamika Global : Rebranding Keunggulan Kompetitif Berbasis Kearifan Lokal*, 2(4), 525 - 537.

Gosal, R. (2017). Peran Lurah Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(2).

Herman K, M. M., & Tahir, M. M. (2015). Komunikasi Pemerintah Dalam Pengelolaan Tambang Di Kabupaten Gowa. *Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar Vol. V No.2* , 138-148.

Istiyanto, S. B. (2011). Komunikasi Pemerintah Daerah dalam Program Pembangunan Daerah Wisata Pantai Pascabencana. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9, 16 - 27.

Maryadi. (2010). *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif Menyenangkan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

- Noviko, S. (2016, September). KEBIJAKAN RELOKASI PKL (STUDI TENTANG PROSES KEBIJAKAN RELOKASI PKL JALAN DIPAYUDA DAN MT. HARYONO KE PUSAT KULINER KABUPATEN BANJARNEGARA). *Jurnal Sawala*, 4, 49-62.
- Pantow, J. T., Mingkid, E., & Kawengin, K. (2017). Peran Komunikasi Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program Bersih Kampung (Studi Pada Pemerintah Desa Lopana Satu Kecamatan Amurang Timur) . *e-jurnal "Acta Diurna"*.
- Purnamasari, N. A. (2012). *Strategi Komunikasi Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Shelter Guyub Rukun Manahan Kota Surakarta*. Surakarta: Ums.ac.id.
- Ramadhani, M. A., & Abdullah, R. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11, 1-12.
- Silalahi, u. (2004). Komunikasi Pemerintahan : Mengirim dan Menerima Informasi Tugas dan Informasi Publik. *Jurnal Admnistrasi Publik*, 3(1), 46.
- Suwondo, Hanafi, I., & Pranata, Y. (2008). Pemerintahan Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) (Studi Pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, Kota Batu). *Administasi Publik*, 1(1), 197 - 200.
- Tjandra, R. (2009). *Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa*.. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Ubedilah, d. (2000). *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Indonesia Center for Civic Education.
- Widodo, A. S., Idayanti, S., Permanasari, D. I., & Sahri, A. (2016, april). Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Kota Tegal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 1, 168 - 186.

Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta: Center for Academic Publishing Service.

BERITA

Ansori, M. (2018, Februari Rabu). Diambil kembali dari Sorot Purworejo: <http://purworejo.sorot.co/berita-7824-puluhan-pkl-alun-alun-kehilangan-kesempatan-tempati-romansa-kuliner.html>

Heksantoro, R. (2017, Juli senin). *Ratusan Pedagang Kaki Lima Demo di DPRD Purworejo*. Diambil kembali dari Detik.com: <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3580419/ratusan-pedagang-kaki-lima-demo-di-dprd-purworejo>

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha Serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo No 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031.

Peraturan Bupati No 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo No 59 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah kabupaten Purworejo No 2 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha Serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Keputusan Bupati No 180 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Penataan dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Purworejo.